

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

A. Latar Belakang Berdirinya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau.

Dinamika pembangunan di bidang sosial, budaya dan ekonomi serta kemajuan teknologi informasi di era globalisasi selain membawa dampak positif ternyata juga dapat menimbulkan fenomena sosial baru seperti tindak kekerasan, pelecehan seksual dan perdagangan orang dan paling rentan menjadi korban adalah perempuan dan anak-anak. Menindak lanjuti fenomena tersebut maka dalam Peraturan Presiden RI No. 38 Tahun 2008 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2009 yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan serta mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Salah satu programnya adalah pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).⁶⁵

Peraturan pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antara pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota, mengamanatkan bahwa program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Provinsi, Kabupaten, dan Kota, terutama terkait dengan pelaksanaan pelayanan dasar. Sehubungan dengan hal tersebut, kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mempunyai Norma, Standar, Prosedur, Kreteria (NSPK) dalam bentuk pedoman pelaksanaan pembangunan

⁶⁵ Brosur P2TP2A Provinsi Riau

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bagi Pemerintah, Provinsi, Kabupaten, Kota.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau merupakan pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya Pemberdayaan Perempuan diberbagai bidang pembangunan, serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari berbagai jenis Diskriminasi dan Tindak Kekerasan, termasuk perdagangan orang, Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Riau berdasarkan keputusan Gubernur Riau No : Kpts/691/IX/2013 tanggal 17 September Tahun 2013 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau. Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Riau di bawah koordinasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BPPPAKB) Provinsi Riau.⁶⁶

B. Letak Geografis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau berada di bawah koordinasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BPPPAKB) Provinsi Riau yang beralamat di Jalan Pepaya Nomor. 67 Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, Riau. Bagian sebelah barat Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Riau terdapat Alfa mart, sebelah Timur terdapat Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Riau, sebelah Utara terdapat Badan Narkotika

⁶⁶ Buku Laporan P2TP2A Provinsi Riau, *Pelaksanaan kegiatan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) Provinsi Riau* (tt.:tp.,tth), 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nasional Provinsi Riau, dan sebelah Selatan terdapat Hotel D,Lira. No telepon Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Riau (0761) 40312, Fax. (0761) 40313.

C. Visi dan Misi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau

a. Visi

Mengedepankan pemberdayaan perempuan dan anak korban tindak kekerasan sesuai dengan prinsip Hak Asasi Manusia.

b. Misi

1. Membangun gerakan bersama untuk mencegah, menghapus kekerasan dan trafiking terhadap perempuan dan anak.
2. Memberikan pelayanan yang meliputi pendampingan psikologi, advokasi, serta informasi terhadap perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan.
3. Menjadikan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Riau sebagai basis pemberdayaan perempuan dan anak secara preventif, kuratif dan rehabilitatif.⁶⁷

D. Pengertian Dan Fungsi

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau adalah:

1. Merupakan salah satu wadah pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang berbasis masyarakat.

⁶⁷ Buku P2TP2A Provinsi Riau, *profil P2TP2A Provinsi Riau* (tt.:tp.,tth), 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pelaksanaannya dilaksanakan oleh seluruh kekuatan masyarakat dengan cara ikut berperan secara aktif sesuai dengan kemampuannya.
3. Pemerintah daerah memberikan dukungan dan komitmen yang kuat serta memfasilitasi pelaksanaannya dengan melibatkan peran serta masyarakat (LSM, Ormas, Sektor Swasta, Dunia Usaha, Lembaga / Donor, dll).

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Riau berfungsi dan berperan meliputi:

1. Pelayanan informasi
2. Konsultasi psikologis dan hukum
3. Pendampingan dan advokasi
4. Pelayanan medis (rujukan)
5. Rumah aman / shelter (Rujukan).⁶⁸

E. Bentuk-Bentuk Kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Riau

Adapun bentuk-bentuk kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Riau, yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan layanan *hotline* melalui telepon layanan.
2. Memberikan layanan informasi bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan upaya pencegahan.

⁶⁸ *Ibid*, 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Memberikan rujukan untuk layanan medis bermitra kerja dengan instansi.
4. Memberikan layanan pendampingan hukum bermitra kerja dengan Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman.
5. Layanan konsultasi psikologis/layanan konseling.
6. Memberikan layanan rumah aman bermitra dengan Dinas Sosial dan Badan Pemberdayaan Perempuan Masyarakat Dan Keluarga Berencana.
7. Melakukan *Home Visit*.⁶⁹

F. Tujuan Terbentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Riau

1. Tujuan Umum

Memberikan kontribusi terhadap terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dengan mengintegrasikan strategi pengurus utama gender (PUG) dalam berbagai kegiatan pelayanan terpadu bagi peningkatan kondisi, peran dan perlindungan perempuan serta memberikan kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak di Provinsi Riau.⁷⁰

2. Tujuan Khusus

- a) Menyediakan sarana yang dikelola oleh masyarakat secara mandiri atau dalam kemitraan masyarakat dengan pemerintah bagi perempuan untuk mendapatkan informasi dan pelayanan

⁶⁹ Dokumentasi P2TP2A Provinsi Riau

⁷⁰ Brosur P2TP2A Provinsi Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi penyelesaian masalah yang dialami oleh perempuan atau upaya peningkatan kualitas hidupnya.

- b) Menghimpun berbagai pelayanan bagi perempuan baik yang disediakan oleh pemerintah maupun oleh lembaga atau organisasi masyarakat dalam suatu sarana yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- c) Meningkatkan kepedulian berbagai lembaga atau organisasi masyarakat dan pemerintah untuk memberikan pelayanan yang “bersahabat” bagi perempuan.⁷¹

G. Tugas Pokok dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Riau.

1. Tugas Pokok Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Riau.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Riau merupakan wadah pemberdayaan perempuan dan anak yang berbasis masyarakat. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Riau memiliki bagian-bagian sesuai dengan kebutuhan dan pokok permasalahan yang menjadi fokus penanganan di setiap daerah.

2. Tugas Khusus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Riau, yaitu:

⁷¹ *ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Menyediakan berbagai pelayanan bagi perempuan dan anak.
 - b) Menyediakan sarana bagi peningkatan kualitas hidup perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak.
 - c) Meningkatkan peranserta masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholder) dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak.
3. Fungsi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Riau Provinsi Riau.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Riau memfasilitasi penyediaan berbagai pelayanan untuk masyarakat baik fisik dan non fisik, yang meliputi antara lain:

- a) Informasi dan data.
- b) Rujukan.
- c) Konsultasi/Konseling.
- d) Pelatihan keterampilan.⁷²

H. Lembaga Rujukan

1. Rumah Sakit /Pusat Krisis Terpadu
2. Ruang Pelayanan Khusus (Kepolisian)
3. Rumah Aman/Shelter
4. Lembaga Bantuan Hukum

⁷² *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Dinas Pendidikan.

6. Dinas Sosial (PSBR/RPSA Rumbai, Tengku, DII).⁷³

I. Unsur Terkait (Mitra Kerja) Dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Riau

1. Pemerintah Daerah (Badan PP-PA);
2. Unit PPA (Kepolisian);
3. Dinas Sosial;
4. Dinas Pendidikan;
5. Dinas Kesehatan;
6. Kanwil Kementerian Agama;
7. Tokoh Agama & Tokoh Masyarakat;
8. Akademisi;
9. LSM/NGO
10. Dunia Usaha.⁷⁴

J. Dasar Hukum Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Riau Provinsi Riau, yakni:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁷³ Dokumentasi P2TP2A Provinsi Riau

⁷⁴ Dokumentasi P2TP2A Provinsi Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
4. Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
5. Undang-undang No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial.
6. Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan RI No. 01 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. BAB I, Pasal 1, ayat 13: unit Pelayanan Terpadu atau disingkat UPT adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. UPT tersebut dapat berada di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) dan Pusat Krisis Terpadu (PKT) yang berbasis Rumah Sakit, Puskesmas, **Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)**, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA), Rumah Perlindungan Trauma Centre (RPTC), Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), BP4 dan lembaga-lembaga keumatan lainnya, Kejaksaan, Pengadilan, Satuan Tugas Pelayanan Warga pada Perwakilan RI di luar negeri, Women Crisis Centre (WCC), Lembaga Bantuan Hukum (LBH), dan lembaga sejenis lainnya. Layanan ini dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbentuk satu atap (*one stop crisis centre*), atau berbentuk jejaring.

8. Surat keputusan Gubernur Riau KPTS.765/I/2012 tanggal 11 januari 2012 tentang pembentukan pusat pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau.
9. Undang-undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Korban.⁷⁵

K. Pelaksanaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Riau di Daerah

Pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) merupakan suatu instansi yang wajib diderah untuk membentuknya, karena melihat dari hari kehari angka kekerasan terhadap perempuan dan anak cukup tinggi. Maka dari itu untuk Provinsi Riau, P2TP2A sudah dibentuk 12 Kabupaten / Kota yaitu:

1. P2TP2A Prov. Riau
2. P2TP2A Kota Pekanbaru
3. P2TP2A Kab. Kampar
4. P2TP2A Kab. Inhil
5. P2TP2A Kab. Inhu
6. P2TP2A Kab. Rohul
7. P2TP2A Kab. Rohil
8. P2TP2A Kota Dumai

⁷⁵Buku P2TP2A Provinsi Riau, *profil P2TP2A Provinsi Riau Tahun 2016*, (tt.:tp.,tth), 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. P2TP2A Kab. Bengkalis

10. P2TP2A Kab. Pelalawan

11. P2TP2A Kab. Kuansing

12. P2TP2A Kab. Meranti

Dua belas kabupaten yang sudah membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak tetapi belum semua dalam operasional hal ini karena karena berbagai faktor misalnya seperti anggaran dana, tidak memiliki psikolog atau konselor, sehingga kasus klien di serahkan atau dirujuk ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak provinsi Riau. Konselor dalam menyelesaikan kasus klien yang diluar daerah kota Pekanbaru namun masih dalam Provinsi Riau konselor harus datang kedaerah tersebut untuk menyelesaikan kasus klien. Dengan adanya wadah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di daerah (kabupaten/kota) banyak bermanfaat yang dirasakan oleh masyarakat itu sendiri.⁷⁶ kasus kejahatan seksual yang di dilaporkan dan ditangani oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Riau banyak rekomendasi dari kabupaten-kabupaten atau kota yang berada disekitar Provinsi Riau dan ada juga klien yang datang langsung ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Riau.

pusat pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau saling bekerja sama dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang lain yang berada di daerah Riau.

⁷⁶ Buku Laporan P2TP2A Provinsi Riau, *Pelaksanaan kegiatan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) Provinsi Riau* (tt.:tp.,tth), 4.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN : Keputusan Gubernur Riau
Nomor : 86 / I / 2017
Tanggal : 12 Januari 2017

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS PUSAT PELAYANAN
 TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A)
 PROVINSI RIAU TAHUN 2017**

Tabel 4.1

No	Nama	Instansi	Kedudukan Dalam Kepengurusan
1	Gubernur Riau	Pemerintah Provinsi Riau	Penasehat
2	Sekretaris Daerah Provinsi Riau	Daerah Provinsi Riau	Pengarah
3	Kepala Dinas PP dan PA Provinsi Riau	Dinas PP dan PA Provinsi Riau	Penanggung Jawab
4	Kabid Perlindungan Hak Perempuan	Dinas PP dan PA Provinsi Riau	Penanggung Jawab
5	Dra. Risdhayati, M.Si	Dosen UNRI	Ketua
6	H.M. Said Wan, Sh	Advokat	Wakil Ketua I
7	Kepala Bidang Perlindungan Dan Tumbuh Kembang Anak	Dinas PP dan PA Provinsi Riau	Wakil Ketua II
8	Seksi Hak Perempuan Dan KDRT	Dinas PP dan PA Provinsi Riau	Sekretaris
9	Matridi Umar	Tokoh Masyarakat	Ketua Divisi Pendataan dan Dokumentasi
10	Antoni Subeno, Sh	Dinas PP dan PA Provinsi Riau	Anggota Divisi Pendataan dan Dokumentasi
11	Robyanto, S. Kom	Dinas PP dan PA Provinsi Riau	Anggota Divisi Pendataan dan Dokumentasi
12	Mhd. Jefry Pramuja	Dinas PP dan PA Provinsi Riau	Anggota Divisi Pendataan dan Dokumentasi
13	Yanwar Arief, M.Psi	Dosen UIR	Ketua Divisi Pelayanan
14	Fety Nurhidayati, S.Psi, PSI	Diknas Provinsi Riau	Anggota Divisi Pelayanan
15	t. nindya eka putri nurhasanah, S. Psi	Psikolog	Anggota Divisi Pelayanan
16	Drs. H. Edi Tasman, M.Si	Kemenag Provinsi Riau	Anggota Divisi Pelayanan
17	Syafitri elisa, S. Psi	Sarjana Psikologi	Anggota Divisi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			Pelayanan
18	Sri Wahyuni, S.ST, M.Si	Pekerja Sosial Kemensos RI	Anggota Divisi Pelayanan
19	Drs. Hj. Puspa Juita	Tokoh Masyarakat	Ketua Divisi Pemulihan
20	Hj. Yenita Rizal, SE, MH	Disnakertransduk Prov. Riau	Anggota Divisi Pemulihan
21	Liyandri	Mahasiswa fakultas bimbingan konseling di UIN	Anggota Divisi Pemulihan
22	Leni Febriati, SHI	DPC Himpunan wanita disabilitas indonesia	Anggota Divisi Pemulihan
23	Ronal, S. ST	Pekerja Sosial Kemensos RI	Anggota Divisi Pemulihan
24	Jon Kosner, SH	Advokat	Ketua Divisi Pendampingan dan Advokasi
25	Kanit Renakta	Polda Riau	Anggota Divisi Pendampingan dan Advokasi
26	Syahidila Yuri, SH, MH	Advokat	Anggota Divisi Pendampingan dan Advokasi
27	Dewi Kartini, S. Sos	Dinsos Provinsi Riau	Sekretariat
28	Anggi Fridayani Putri, Sh	Dinas PP dan PA Provinsi Riau	Sekretariat
29	Rofikah, S. Pd	KOHATI	Sekretariat
30	Fitri Khairunisa, S. Tp	KOHATI	Sekretariat
30	Melsya Trivianti, S. Pi	KOHATI	Sekretariat
31	Rindi Novsupra Yogi	Dinas PP dan PA Provinsi Riau	Sekretariat

Sumber : Dokumentasi P2TP2A Provinsi Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

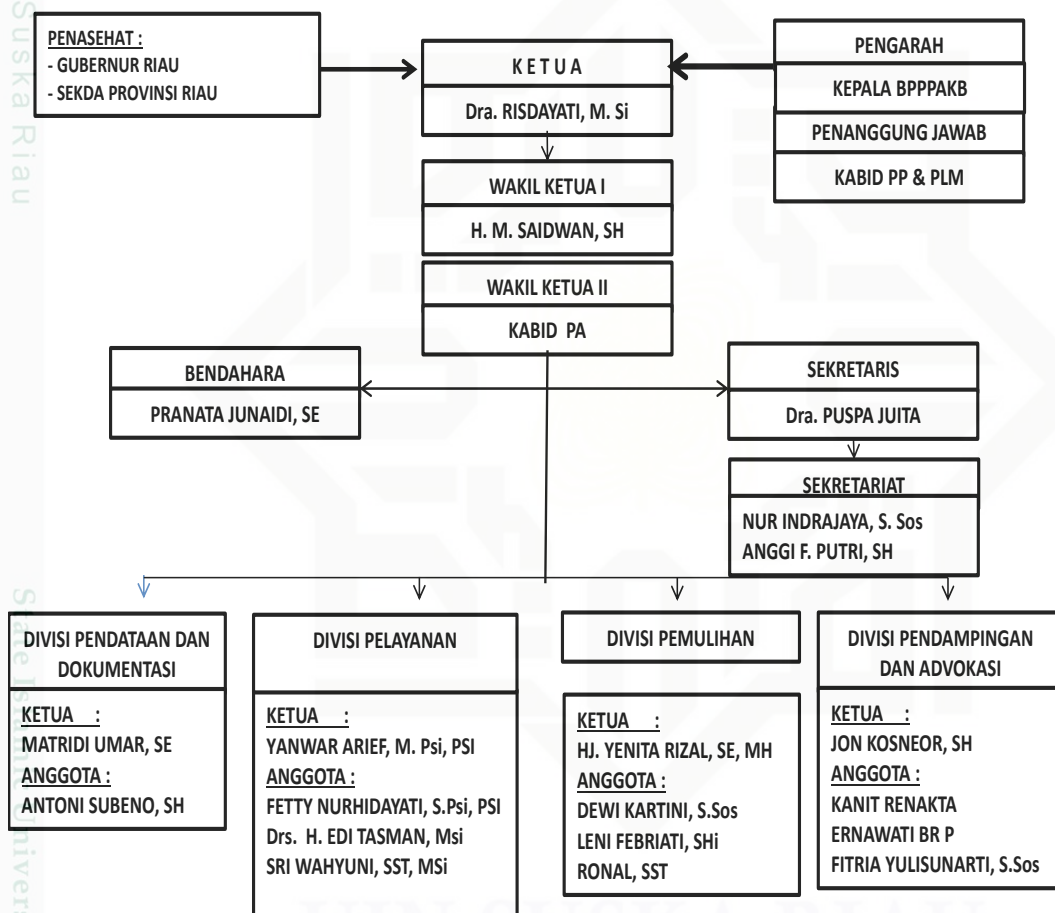
M. Susunan Organisasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Riau

Gambar 4. 1

STRUKTUR ORGANISASI

PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A)

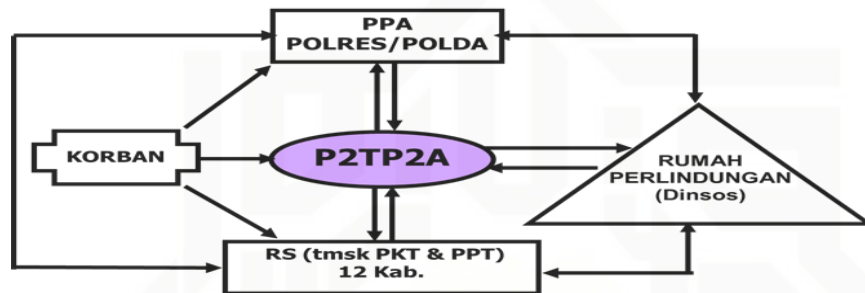
SK Gubernur Provinsi Riau No. KPTS.32/I/2016 Tanggal 7 Januari 2016



Sumber : Dokumentasi P2TP2A Provinsi Riau

N. Mekanisme Penanganan Kasus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Provinsi Riau

Gambar 4.2
**MEKANISME
PENANGANAN KASUS**



Sumber : Dokumentasi P2TP2A Provinsi Riau

O. Alur Pelayanan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Riau

Gambar 4.3

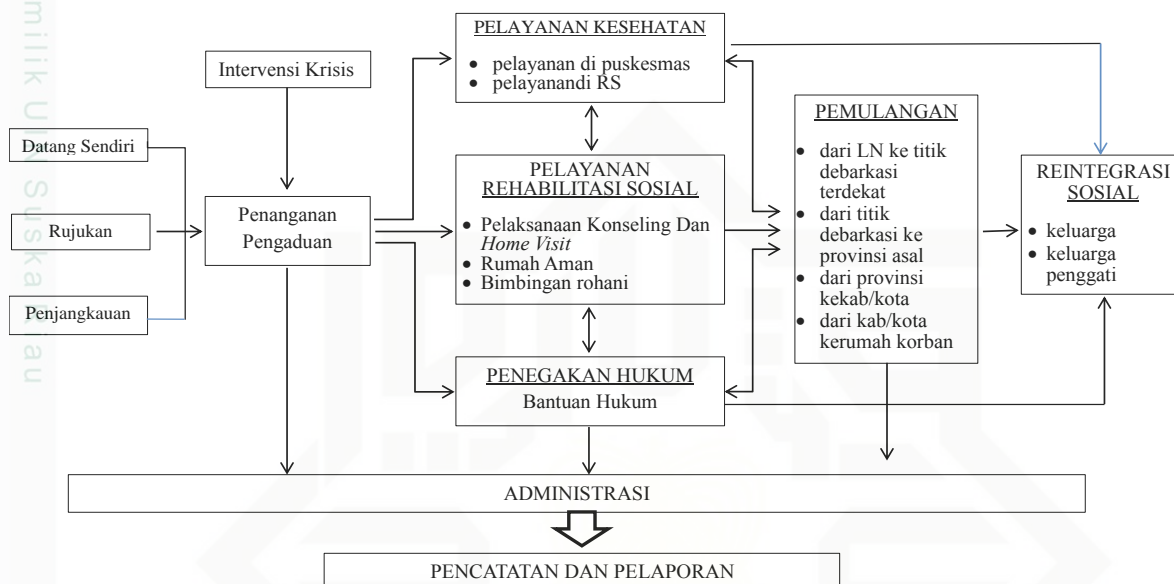


Sumber : Dokumentasi P2TP2A Provinsi Riau

P. Alur Peangan Kasus Pada Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan

gambar 4.4

Alur Penanganan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan



Q. Data Kasus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Riau Tahun 2011 Sampai 2016

tabel 4.2

No.	Jenis Kasus	Tahun						Jumlah
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)
1	KDRT	44	24	55	33	41	69	249
2	Kejahatan Seksual	12	13	21	33	32	48	126
3	Hak Asuh Anak	9	7	15	9	14	24	73
4	ABH	5	10	12	7	1	9	41
5	Penganiayaan	2	6	17	4	6	5	38
6	Anak Hilang	4	3	6	2	0	1	16
7	Trafficking	5	6	3	1	2	4	21
8	Kekerasan Psikis	1	2	9	2	5	4	21
9	Kasus Pendidikan Anak	4	1	4	4	7	2	22
10	Kekerasan Fisik	1	0	0	0	1	4	4
11	Pidana Murni	3	1	2	0	0	4	7
12	Kenakalan Remaja	3	0	0	1	3	10	13
13	Penelantaran Tenaga Kerja	2	0	1	0	0	0	3
14	Pencemaran Nama Baik	0	1	1	0	0	0	2
15	Menuntut Perjanjian	1	0	0	0	0	0	1
16	Narkoba	0	0	1	0	3	1	5
17	Pelanggaran HAM	0	0	0	2	0	0	2
Jumlah		96	74	147	98	115	170	700

Sumber : P2TP2A Prov Riau

Tanggal : 15 Maret 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

R. Data Kasus Berdasarkan Bulan dari Tahun 2011 s/d 2016

Tabel 4.3

No.	Bulan	Tahun						Jumlah
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)
1.	Januari	9	5	17	19	4	9	63
2.	Februari	8	10	9	11	7	18	63
3.	Maret	6	9	7	7	12	15	56
4.	April	5	12	11	7	2	16	53
5.	Mei	6	7	19	15	9	14	70
6.	Juni	7	6	16	6	8	10	53
7.	Juli	5	2	6	4	14	13	44
8.	Agustus	5	6	8	6	20	14	59
9.	September	9	5	17	3	7	12	53
10.	Oktober	17	4	14	11	12	11	69
11.	November	11	4	9	5	16	29	74
12.	Desember	8	4	14	4	4	9	43
Jumlah		96	74	147	98	115	170	700

Sumber P2TP2A Prov Riau

Tanggal : 15 Maret 2017

S. Data Kasus Berdasarkan Wilayah Yang Ditangani oleh P2TP2A Provinsi Riau dari Tahun 2011 s/d 2016

Tabel 4.4

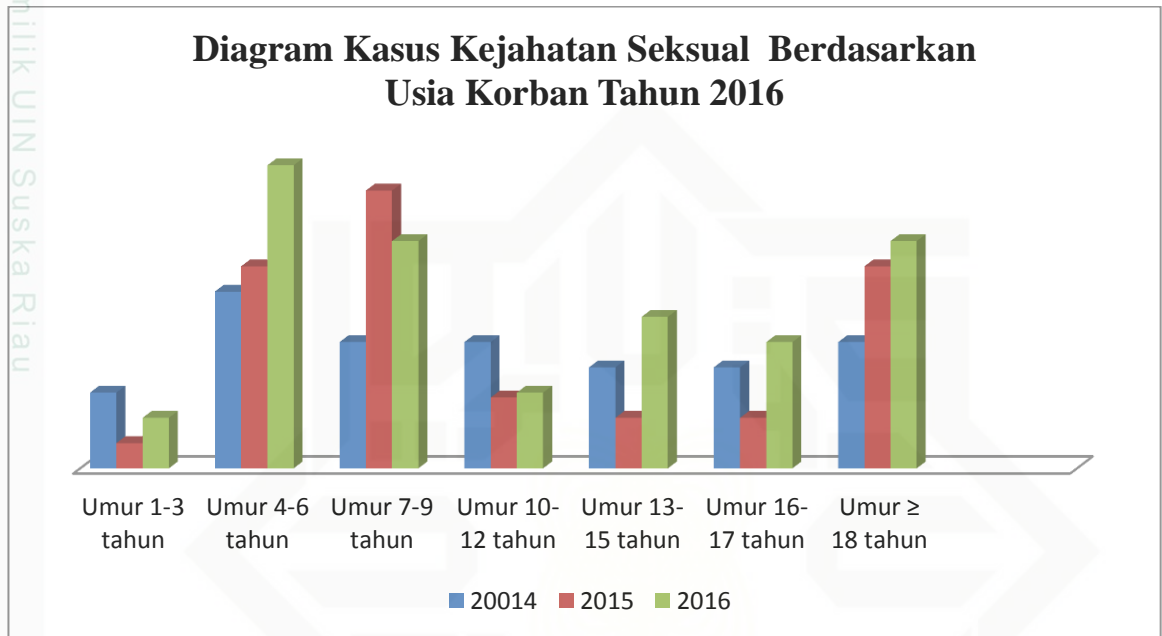
No.	Nama Kabupaten/kota	Tahun						Jumlah
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)
1	Kota Pekanbaru	57	62	93	64	78	105	459
2	Kab. Kampar	5	2	15	12	19	16	69
3	Kab. Bengkalis	1	3	15	2	3	15	39
4	Kota Dumai	1	2	3	2	2	4	14
5	Kab. Rokan Hulu	2	1	5	5	2	8	23
6	Kab. Rokan Hilir	0	0	3	5	3	5	16
7	Kab. Indragiri Hilir	1	0	1	1	0	4	7
8	Kab. Indragiri Hulu	11	0	1	1	1	2	16
9	Kab. Kep. Meranti	0	0	2	1	2	2	7
10	Kab. Siak	1	1	3	0	3	3	11
11	Kab. Kuansing	9	1	1	1	2	2	16
12	Kab. Pelalawan	8	2	5	4	0	4	23
13	Prov Sumbar	0	0	0	0	1	0	1
Jumlah		96	74	147	98	115	170	700

Sumber P2TP2A Prov Riau

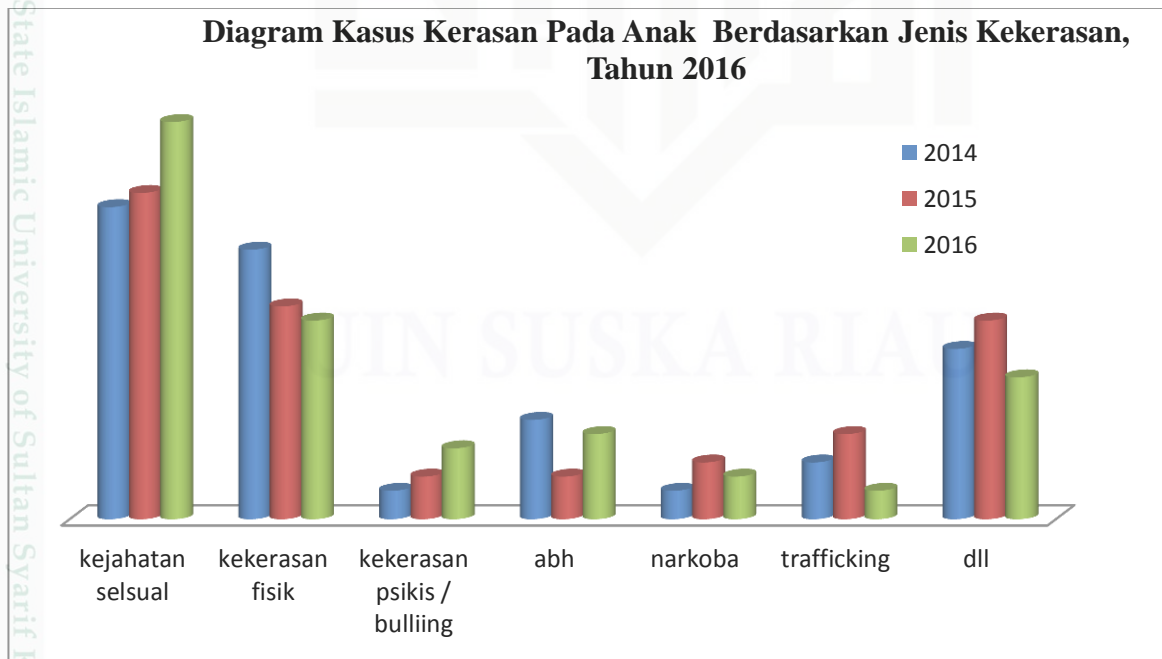
Tanggal : 15 Maret 2017

T. Diagram Kasus Kejahatan Seksual Yang Ditangani Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Provinsi Riau

Grafik 4.1



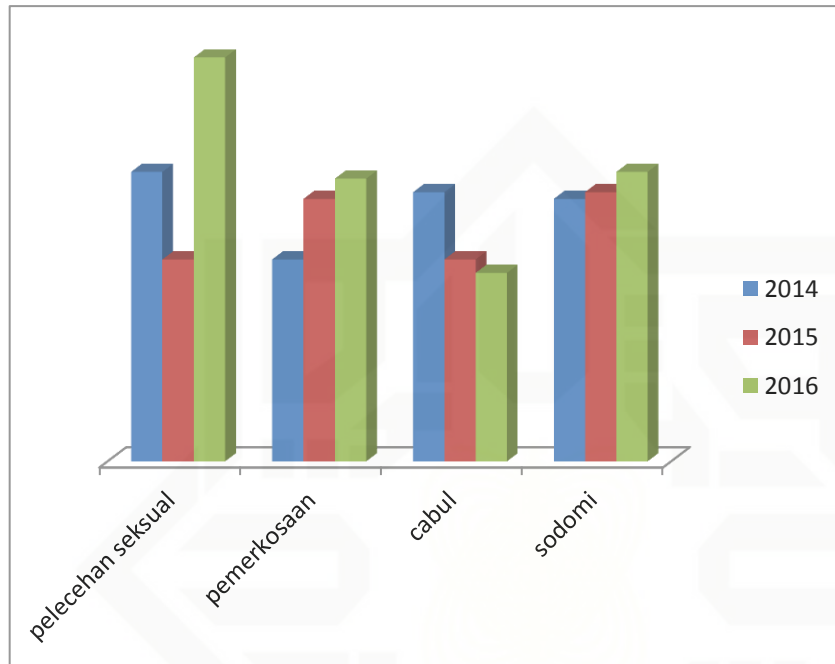
Grafik 4.2



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Grafik 4.3

Diagram Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Tahun 2016



Grafik 4.4

Jumlah Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak Berdasarkan Kabupaten / Kota Tahun 2016

